

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Agama selalu menjadi isu sensitif bagi pemerintahan Orde Baru. Untuk mendorong keseragaman ideologis, pada tahun 1978 pemerintah memulai satu program indoktrinasi wajib mengenai ideologi negara Pancasila bagi semua warga. Pemerintah Orde Baru sangat *phobi* terhadap aktivitas umat Islam, terutama, mereka yang kritis dan belum sepenuhnya mau atau setuju dengan tafsir pemerintah tentang Pancasila. Demikian pula umat Islam juga belum sepenuhnya sepakat dengan pelbagai kebijakan pemerintah tentang Undang-Undang Pendidikan Nasional, Undang-Undang Perkawinan, masalah keharusan setiap Organisasi Masyarakat (ormas) dan partai politik berasaskan Pancasila. Semua ini menjadi faktor renggangnya hubungan Islam dan negara. Akibat dari ketegangan ini adalah terjadinya peristiwa Tanjung Priok pada 12 September 1984 (Abdullah, 2008: 66).

Peristiwa yang pada awalnya dipicu oleh pamflet yang dipasang di mushala yang isinya adalah ajakan diskusi mengenai kebijakan pemberlakuan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi, ditanggapi dengan *represif* oleh pihak aparat dan berujung penangkapan empat orang ulama yaitu Amir Biki, Salim Qadar, Syarifin Maloko dan Mohamad Nasir. Akibat dari penangkapan ini masyarakat merespon dengan mengusut pembebasan keempat rekan mereka dan terjadilah bentrokan yang mengakibatkan banyak korban jiwa dari pihak sipil (Umi,2010)

Konsekuensi dari peristiwa ini adalah penangkapan dan pembatasan terhadap sejumlah tokoh Islam. Juga pembatasan serta pengawasan para mubaligh, baik dalam gerak-gerik maupun materi ceramah atau dakwah. Apa yang dilakukan pemerintahan Orde Baru terhadap para sastrawan seperti penangkapan Pramodya Ananta Toer dan tokoh-tokoh kritis di bidang sosial dan politik salah satu contohnya adalah penangkapan Wiji Thukul, juga dilakukan terhadap para tokoh agama seperti contoh pada peristiwa Tanjung Priok. Peristiwa ini memiliki dampak psiko-sosial yang amat luas berupa mengendapnya suara-suara kritis dari kalangan ulama.

Akhir tahun 1980-an ketegangan antara pemerintahan Orde Baru dan Umat Islam tidak juga menemui titik terang, akibat dari ketegangan ini pemerintah dihadapkan pada gerakan sosial bercorak keagamaan, hal ini merupakan imbas dari peraturan pemerintah yang menerapkan asas tunggal Pancasila, karena pada awal penerapan asas ini banyak yang ditanggapi beragam terutama dari kalangan pemimpin Islam (Syukur, 2008 : 218). Gerakan-gerakan itu pada dasarnya dapat dianggap sebagai proses dinamika intern dalam masyarakat-masyarakat lokal atau regional. Gerakan-gerakan tersebut memang masih bersifat mikro. Akan tetapi gerakan-gerakan sosial bercorak keagamaan itu menimbulkan kekhawatiran yang cukup besar bagi pemerintah yang berkuasa. Jika meminjam istilahnya Sartono Kartodirdjo maka gerakan-gerakan sosial keagamaan itu disebut sebagai gerakan Ratu Adil (*millenarianisme*) (Kartodirdjo, 1992: 10).

Unsur pokok dari gerakan Ratu Adil menurut Kartodirdjo (1992) adalah seorang pemimpin keagamaan yang merupakan prophet, atau guru, atau dukun, atau tukang sihir atau utusan atau mesias. Pemimpin-pemimpin ini mengaku diilhami wahyu. Ciri kedua yang harus ditandaskan adalah penolakan terhadap situasi yang ada dan harapan akan datangnya millennium. Di samping hidupnya kembali mengajak pada nilai-nilai tradisional, millennium biasanya mengidamkan suatu masyarakat yang ideal dan meromantiskan zaman yang datang sebagai zaman keemasan. Dunia yang diidamkan itu digambarkan sebagai berikut, “jika zamannya nanti, tak akan ada lagi pertentangan, ketidakadilan dan penderitaan; rakyat akan bebas dari pembayaran pajak yang memberatkan, dari wajib menjalankan kerja bakti. Tidak akan ada penyakit dan pencuri; sandang pangan akan melimpah; setiap orang memiliki rumah, orang akan hidup tentram dan damai” (Kartodirdjo, 1992: 15)

Salah satu gerakan sosial yang bercorak keagamaan yang ada pada waktu itu adalah gerakan *haur koneng* (bambu kuning) karena pengikut gerakan ini kemana-mana membawa bambu kuning. Bertempat di daerah Majalengka lebih tepatnya Dusun Gunung Seureuh Kecamatan Lemahsugih. Gerakan yang dipimpin oleh Abdul Manan sebagai seorang yang dianggap *mesias* oleh para pengikutnya. Sebagai seseorang yang memiliki kharisma, sudah menjadi anggapan umum bahwa pimpinan yang berkharisma merupakan bahaya laten bagi para pejabat dalam kekuasaan, karena kekuatan kharisma pada dasarnya bersifat revolusioner. Tidak dapat disangsikan, hal ini berlaku dalam masyarakat

tradisional dan orang dapat menyebutkan contoh-contoh di mana para pemimpin keagamaan merupakan tantangan bagi kekuasaan pemerintah.

Kelompok haur koneng mengkritisi beberapa peraturan pemerintah misalnya pembayaran pajak bumi dan bangunan, karena menurut kelompok ini pembayaran pajak tidak ada kaitannya dengan mensejahterakan rakyat. kelompok haur koneng juga menolak sensus alasannya sama tidak ada kaitan dengan kesejahteraan. Kelompok ini juga memisahkan diri dari masyarakat sekitar alasannya untuk menghindari pembelian SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah). Akibat dari sikap kritis ini kelompok haur koneng dianggap sesat dan makar terhadap negara, Aparat bertindak represif terhadap kelompok haur koneng ini.

Berdasarkan uraian tersebut, sebagai seorang mahasiswa yang belajar pada jurusan Pendidikan Sejarah. Peneliti merasa peristiwa Haur Koneng adalah salah satu peristiwa sejarah di Indonesia yang menarik untuk dikaji. Selain itu sebagai bagian dari masyarakat asli Majalengka, peneliti memiliki keinginan untuk menggali sejarah lokal Majalengka yang memiliki nilai penting bagi sejarah Indonesia umumnya. Penelitian ini akan menjadi sebuah penelitian yang memberikan sumbangan berarti bagi khazanah sejarah Indonesia pada tingkat lokal berkaitan dengan sejarah pemerintahan Orde Baru. Untuk merealisasikannya, maka penulis berkeinginan untuk menulisnya ke dalam sebuah karya ilmiah dengan berbentuk skripsi, adapun judul skripsi ini adalah “Haur Koneng:Akar Masalah Konflik Vertikal di Kabupaten Majalengka 1993”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, masalah utama yang akan dikaji adalah “Mengapa terjadi konflik antara kelompok Abdul Manan dengan aparat keamanan?”. Agar pembahasan lebih terfokus maka penulis membatasi pokok bahasan dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang terjadinya peristiwa Haur Koneng pada tanggal 28-29 Juli 1993 di Majalengka?
2. Bagaimana peranan Abdul Manan di dalam gerakan sosial Haur Koneng?
3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan setelah terjadi peristiwa Haur Koneng?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok pemikiran di atas, menjawab dan memecahkan rumusan masalah yang ada merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh penulis. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peristiwa Haur Koneng. Selain itu penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan terbentuknya gerakan haur koneng
2. Memaparkan peranan Abdul Manan di dalam gerakan haur koneng
3. Mendeskripsikan latar belakang terjadinya peristiwa haur koneng, meliputi hubungannya dengan kebijakan pemerintahan Orde Baru.
4. Memaparkan jalannya konflik kelompok Abdul Manan dengan aparat keamanan.
5. Menggali dampak yang terjadi setelah peristiwa haur koneng, meliputi tindak lanjut pemerintah terhadap peristiwa ini.

6. Menghubungkan penelitian peristiwa Haur Koneng dengan KD menganalisis perkembangan pemerintahan Orde Baru.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai “*Peristiwa Haur Koneng*” ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1.4.1 Secara Teoritik

- a) Memberikan penjelasan terbentuknya gerakan haur koneng
- b) Memaparkan peranan Abdul Manan di dalam kelompok haur Koneng
- c) Memberikan penjelasan tentang Peristiwa Haur Koneng
- d) Menggali informasi aktual tentang peristiwa Haur Koneng yang pada awalnya dianggap sebagai pemberantasan kelompok yang menyebarkan paham sesat oleh aparat keamanan dan akan melakukan makar.
- e) Menganalisis jalannya Peristiwa Haur Koneng dan hubungannya dengan pemerintah Orde Baru

1.4.2 Secara Praktik

- a) Manfaat bagi penulis adalah sebagai salah satu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
- b) Bagi lembaga adalah memperkaya penulisan tentang sejarah pemerintahan dan Orde Baru;
- c) Karya ilmiah ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, pemikiran dan perbandingan dalam penulisan sejarah selanjutnya

Cece Ubaedilah, 2013

Peristiwa Haur Koneng :Akar Masalah Konflik Vertikal Di Kabupaten Majalengka 1993
 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1.5 Metode dan Teknik Penelitian

1.5.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, menurut Sjamsuddin metode historis ini merupakan sebuah cara bagaimana mengetahui sejarah dengan tahapan-tahapan tertentu (Sjamsuddin, 2007: 14). Adapun tahapan-tahapan dalam penulisan sejarah lokal sama halnya dengan tahapan-tahapan penulisan sejarah pada umumnya, menurut Widja (1991) di dalam penyusunan sejarah lokal diperlukan empat langkah utama dalam kegiatannya. Langkah pertama adalah mengumpulkan jejak atau sumber sejarah, kedua menyeleksi atau menyaring jejak sumber sejarah, ketiga interpretasi hubungan antara fakta yang mewujudkan peristiwa tertentu, terakhir adalah penulisan sejarah (Widja, 1991:20).

Langkah pertama dari prosedur penelitian sejarah adalah pengumpulan jejak atau sumber sejarah yang dikenal dengan sebutan heuristik. Kegiatan heuristik ditujukan untuk menemukan serta mengumpulkan jejak-jejak dari peristiwa sejarah sebenarnya yang mencerminkan berbagai aspek aktivitas manusia di waktu yang lampau. Secara umum sumber sejarah dibagi menjadi dua jenis yaitu sumber Primer atau kesaksian dari seseorang saksi yang secara langsung melihat peristiwa sejarah melalui panca indera yang dimiliki atau secara langsung ada pada saat peristiwa terjadi. Kedua adalah sumber sekunder adalah kesaksian dari orang yang tidak melihat secara langsung peristiwa dan tidak ada di tempat berlangsungnya peristiwa sejarah (Gottschalk, 1975: 35). Pada tahap

heuristik penulis mengumpulkan sumber-sumber sejarah berupa jejak non-material (tradisi, bahasa, dan lain-lain), jejak material (artefak-artefak, bangunan, atau benda lain yang bersifat konkrit), jejak tertulis (catatan perjalanan, manuskrip, surat kabar, dan majalah), dan sumber lisan.

Langkah kedua adalah kritik sumber yaitu sebuah kegiatan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menyaring sumber-sumber yang telah dikumpulkan, sehingga hanya sumber-sumber sejarah yang benar-benar otentik saja yang akan dijadikan bahan penulisan sejarah lokal. Dari tahapan kegiatan kritik sumber ini dapat ditemukan keilmiahan cara kerja sejarawan pada umumnya karena disiniilah terletak pada kesahihan suatu tulisan sejarah itu benar-benar mengemukakan fakta yang sebenarnya bukan imajinasi saja. Kritik sumber terbagi kedalam dua tahapan yaitu kritik ekstern untuk menjawab pertanyaan keaslian sumber sejarah dan kritik intern untuk membuktikan kebenaran informasi sejarah apakah dapat dipercaya atau tidak.

Langkah selanjutnya adalah interpretasi yaitu usaha untuk mewujudkan rangkaian fakta yang bermakna. Fakta sejarah yang telah didapatkan perlu disusun dan dihubungkan satu sama lain sedemikian rupa sehingga antara fakta satu dengan fakta lainnya kelihatan sebagai satu rangkaian yang masuk akal dan menunjukkan kecocokan. Setelah itu masuk pada tahapan penelitian sejarah selanjutnya yaitu Historiografi atau proses penulisan sejarah. Dalam tahap Historiografi perlu memperhatikan prinsip periodisasi (urutan peristiwa), prinsip kronologis (urutan-urutan waktu), dan prinsip kausalitas (hubungan sebab akibat).

1.5.2 Teknik Penelitian

Dalam upaya mengumpulkan data dan informasi mengenai penulisan skripsi ini, dilakukan beberapa teknik penelitian yaitu studi literatur dan wawancara. Di dalam studi literatur penulis melakukan studi kepustakaan dengan mengumpulkan sumber dari buku-buku, arsip tertulis, majalah, koran, jurnal, dan buku-buku yang terdapat di dalam internet yang dapat dipercaya kebenarannya. Studi literatur ini dilakukan untuk mencari sumber primer dan sekunder dari peristiwa yang akan ditulis. Langkah-langkahnya penulis mencari sumber sekunder terlebih dahulu dan kemudian menemukan sumber primer yang memberikan keterangan tentang peristiwa Haur Koneng.

Masalah yang sering muncul dalam penulisan sejarah lokal adalah keterbatasan sumber tertulis, oleh karena itu penulis melakukan teknik wawancara untuk mendapatkan sumber lisan. Responden yang menjadi narasumber informasi lisan adalah keluarga Abdul Manan yang masih hidup dan murid Abdul Manan yang pernah mondok di padepokan Abdul Manan, agar penelitian ini tidak terkesan subjektif maka peneliti akan mewawancarai dari pihak kepolisian dan dari pihak yonif 321/ Majalengka untuk melakukan *cross chek* data.

1.6 Sistematika Penulisan

Hasil yang diperoleh melalui telaah pustaka dan wawancara dikumpulkan kemudian disusun kedalam sebuah sistematika penulisan sebagai berikut :

Cece Ubaedilah, 2013

Pertistiwa Haur Koneng :Akar Masalah Konflik Vertikal Di Kabupaten Majalengka 1993
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

BAB I, merupakan pendahuluan dari penulisan. Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah yang di dalamnya memuat penjelasan mengapa masalah yang diteliti timbul dan penting untuk dikaji, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II, Tinjauan kepustakaan. Bab ini berisi tentang berbagai landasan teoritis dan informasi sejarah bersumber pada literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji yaitu mengenai Peristiwa Haur Koneng.

BAB III, Metodologi penelitian. Dalam bab ini diuraikan tentang metode dan teknik penelitian yang digunakan penulis dalam mencari sumber-sumber dan cara pengolahan sumber yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dikaji.

BAB IV, Pembahasan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan seluruh hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Uraian tersebut berdasarkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan pada bab pertama.

BAB V, Kesimpulan. Pada bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan deskripsi dan beberapa saran yang bermanfaat bagi beberapa pihak yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang dibahas.